



Pemkot Siapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik

YOGYA (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta mempersiapkan sistem informasi pelayanan publik semua instansi. Sistem informasi yang akan ditampilkan melalui website itu adalah tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Tengah-DIY guna transparansi dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

"Sistem akan menampilkan skema dan syarat-syarat dalam pengurusan pelayanan publik. Misalnya bagaimana cara mengurus izin usaha atau lainnya, sehingga masyarakat sudah siap dengan syarat-syaratnya saat ke pemkot," terang Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta Kris Sardjono Sutedjo, Minggu lalu.

Sebenarnya selama ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan publik. Namun baru sebagian kecil SKPD yang sudah naik status menjadi Standar Prosedur Pelayanan (SPP).

Dia menjelaskan SPP memiliki bentuk mengikat yang lebih kuat dan signifikan dibandingkan SOP. Pasalnya dengan SPP sudah memuat kesepakatan bersama antara SKPD dengan masyarakat. Salah satu instansi yang menerapkan SPP pelayanan adalah kecamatan.

"Semua SKPD sudah memiliki SOP, tinggal menghimpun dan mengunggahnya ke website. Kami kerja sama dengan bagian TIT. Targetnya beberapa bulan lagi siap tayang," paparnya

Sebelumnya ORI Jateng dan DIY memberikan rapor tentang pelayanan SKPD Pemkot Yogyakarta. Sebagian instansi masih memiliki rapor merah dalam informasi pelayanan publik. Pasca penilaian itu pemkot juga berbenah. Dari pantauan *Merapi* sebagian SKPD sudah menampilkan banner yang berisi skema pelayanan pengurusan atau keluhan seperti di Dinas Kesehatan dan Kimpraswil. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005